

***DINAMIKA KONFLIK ANTARA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA DAN PARTAI KOMUNIS
INDONESIA***

Angga Prasetyo; Farida M Wargadalem; Aulia Novemy Dhita SBK

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya

prasetyoangga084@gmail.com

ABSTRAK

Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI merupakan wadah organisasi yang menampung semua guru di Indonesia. PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam perbaikan kualitas guru di Indonesia. PGRI juga berperan aktif dalam pembangunan pendidikan dengan adanya universitas atau sekolah yang dikelola oleh PGRI. PGRI juga berperan dalam perlawanan guru-guru dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu perjuangan PGRI tidak terlepas dari dinamika setiap masa di Indonesia antara lain; masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi sampai sekarang. Dalam sejarah berdirinya PGRI sampai sekarang tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang muncul dari factor internal maupun eksternal. Pada masa orde lama menuju orde baru, muncul konflik didalam organisasi PGRI, yaitu dimana diakibatkan oleh oleh ikut campurnya PKI yang menyebabkan dualisme organisasi dan kepemimpinan. Dimana PKI membentuk sebuah organisasi serupa dengan PGRI, akan tetapi bermuatan paham komunis. Upaya PKI ini merupakan cara agar PGRI runtuh dan digantikan organisasi guru yang berafiliasi dengan PKI. Perseteruan ini muncul dalam kongres-kongres PGRI. Upaya yang dilakukan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI adalah mengganggu semua kegiatan yang dilakukan PGRI. Basis-basis kekuatan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI terdapat di beberapa daerah di pulau Jawa, sedangkan untuk diluar wilayah jawa dukungan untuk kelompok-kelompok ini sangat kecil, bahkan tidak ada. Setelah munculnya pemberontakan PKI yang gagal pada saat itu, berakhir juga kelompok-kelompok tersebut dalam mengganggu kegiatan organisasi PGRI.

Kata kunci : PGRI, PKI, Perseteruan, guru

ABSTRACT

Indonesian Teachers Association or abbreviated as PGRI is an organization that accommodates all teachers in Indonesia. PGRI has a very important role in education, especially in improving the quality of teachers in Indonesia. PGRI also plays an active role in the development of education with the existence of universities or schools managed by PGRI. PGRI also played a role in the resistance of teachers in Indonesian independence. In addition, the struggle of PGRI is inseparable from the dynamics of every period in Indonesia, among others; the old order, the new order, the reformation until now. In the history of PGRI's establishment until now it is inseparable from the challenges and obstacles that arise from internal and external factors. During the old order to the new order, conflicts emerged within the PGRI organization, which was caused by the interference of the PKI which led to organizational dualism and leadership. Where the PKI This PKI effort was a way for PGRI to collapse and was replaced by teacher organizations affiliated with PKI. This dispute arose in the PGRI congresses. The effort made by people affiliated with PKI was to disrupt all

activities carried out by PGRI. The power bases of people affiliated with the PKI were found in several areas on the island of Java, while outside Java the support for these groups was very small, even non-existent. After the emergence of the PKI rebellion that failed at that time, these groups also ended in disrupting the activities of the PGRI organization.

Keywords: PGRI, PKI, Fight, Teache

PENDAHULUAN

Kegiatan dan usaha dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan masyarakat adalah hal yang paling penting dan merupakan tujuan suatu Negara, sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu kegiatan pendidikan yang dapat membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kepribadian sumber daya manusia di Indonesia, hal tersebut amatlah penting karena Indonesia sedang akan menjalani sebuah proses panjang menuju menjadi suatu Negara yang maju dan memiliki pengaruh dalam kepentingan-kepentingan Dunia. Upaya yang harus dilakukan dalam menciptakan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa yaitu dilakukan dengan cara yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan dan pengetahuan yang diwujudkan oleh pemerintah, masyarakat, dan dalam lingkungan keluarga. Untuk merombak seluruh rangkaian tatanan kegiatan pengembangan dan pendidikan harus dilandaskan pada susunan yang sistematis, sehingga para peserta didik memiliki pengalamam untuk masa depannya dengan memalui proses pemahaman dan pengembangan belajar. Dalam sistem pendidikan ada beberapa susunan yang memerlukan perhatian yang besar yang harus ditata secara sitematis dan dikembangkan secara baik, serta dapat meningkatkan kualitas

dalam diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Jika kita ketahui bahwa secara umum ciri-ciri dalam proses pendidikan memiliki beberapa komponen-komponen yang mendasar yang sangat diperhitungkan, yaitu seorang guru, dimana guru merupakan perofesi yang memiliki peranan pentiang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Kadangkala guru merupakan contoh yang baik bagi para peserta didiknya, dalam berpenampilan, prilaku, adab dan gaya bicara. Sehingga muncul ada stagment bahwa penentu keberhasilan pendidikan terletak pada guru melalui kinerjanya dalam mengembangkan kemampuan dan pemahaman peserta didik dan kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional. Dengan demikian dalam proses menuju untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan profesional, hal tersebut tergantung bagaimana cara pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut.

Seorang guru atau tenaga pengajar merupaka sosok penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam setiap karakter seorang guru bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh guru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Profesi guru merupakan profesi yang memiliki

tantangan dalam setiap kemajuan zaman. Pada masanya guru memiliki peranan dalam perubahan dunia. Pada tanggal 25 November 1945 sesudah kemerdekaan Republik Indonesia PGRI pun lahir. Tahun 1912 merupakan munculnya organisasi PGRI yang pada masa itu disebut dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Setelah itu pada tahun 1932 diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Dikalangan guru-guru bangsa Indonesia telah lama tumbuh semangat kebangsaan. (Kosasih,2016:98)

Pada setiap tanggal 25 bulan November merupakan hari yang berbahagia bagi para guru di Indonesia. Hari yang memiliki arti penting dalam menjadi awal pergerakan para guru muncul dan akhirnya pada hari itu diperingati sebagai hari Guru Nasional. Suasana tersebut bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Berdirinya PGRI merupakan awal dari perjuangan para guru dalam membangun perjuangan kemerdekaan samapi memperjuangkan kesejahteraan guru hal tersebut tak bisa lepas dalam peran vital perjuangan Indonesia saat itu. Organisasi PGRI dalam hal ini memiliki peran penting dalam meletakkan dasar dari kekuatan perkumpulan-perkumpulan para guru di Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keberadaban sesama guru. Terbentuknya PGRI merupakan proses yang cukup lama dan tidak secara cepat. Dalam

setiap perkembangannya organisasi PGRI selalu memperhatikan gerak dan tujuannya dalam setiap zaman. Sebagai upaya pengabdian dan perjuangan terhadap bangsa dan Negara, dengan tugas mulia dalam proses pendidikan bangsa yang berlandaskan pada dasar-dasar Pancasila. Organisasi PGRI datang dalam proses perjuangan panjang sejak zaman penjajahan hingga Proklamasi kemerdekaan. Sebagai upaya dalam memberikan rasa hormat terhadap semua bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru dalam memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita bangsa, maka diperingati sebagai Hari Guru Nasional pada tanggal tersebut. (Kosasih,2016:112)

Sebagai sebuah perkumpulan yang dibentuk sebagai persatuan untuk menghimpun para guru, PGRI terus berkembang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, walaupun mengalami dinamika kegoncangan dalam organisasi tersendiri. Dalam pergerakan awal PGRI banyak ditemui tantangan dan hambatan yang menjadi rintangan organisasi PGRI dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi PGRI. Semangat awal pergerakan PGRI dimulai dengan diadakanya kongres Persatuan Guru Republik Indonesia ke-1 di kota Surakarta, pada tanggal 24-25, bulan November tahun 1945. Pada masa orde lama menuju orde baru, muncul konflik didalam organisasi PGRI, yaitu dimana diakibatkan oleh oleh ikut campurnya PKI yang menyebabkan

dualisme organisasi dan kepemimpinan. Dimana PKI membentuk sebuah organisasi serupa dengan PGRI yaitu PGRI Non Vaksentral yang bermuatan paham komunis. Upaya PKI ini merupakan cara agar PGRI bisa runtuh dan digantikan oleh organisasi tandingan tersebut agar banyak anggota guru yang berafiliasi dengan PKI. Perseteruan ini muncul dalam beberapa kongres-kongres PGRI. Upaya yang dilakukan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI adalah mengganggu semua kegiatan yang dilakukan PGRI. Basis-basis kekuatan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI terdapat di beberapa daerah di pulau Jawa, sedangkan untuk diluar wilayah Jawa dukungan untuk kelompok-kelompok ini sangat kecil, bahkan tidak ada. Setelah munculnya pemberontakan PKI yang gagal pada saat itu, berakhir juga kelompok-kelompok tersebut dalam mengganggu kegiatan organisasi PGRI. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PGRI mengokohkan kekuatan organisasinya dalam mempertahankan ideologi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PKI dalam upayanya untuk mengganggu kestabilan organisasi PGRI. Setelah terbentuknya (PGRI), Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ini terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung ke dalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena

mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh. Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta. Peran Persatuan Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia. Sebagaimana disebutkan, diawal kemerdekaan peran organisasi PGRI menjadi sangat penting dalam menentukan Landasan dan Tujuan Pendidikan Nasional dan Sistem Sekolah serta pembentukan sebagai organisasi perjuangan yang turut serta mengawal dan mengisi kemerdekaan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan perumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana munculnya perseteruan antara PGRI dan PKI? dan 2) Bagaimana upaya-upaya PGRI dalam memperkokoh organisasi dan ideologi. Sesuai dengan berdasarkan rumusan masalah yang sudah di tulis oleh penulis diatas, tulisan ini disusun untuk menjelaskan : 1) menjelaskan munculnya perseteruan antara PGRI dan PKI dan 2) menjelaskan upaya-upaya PGRI dalam memperkokoh organisasi dan ideologi..

METODE PENELITIAN

Dalam Studi ini, penulis memakai beberapa sumber buku dan menggunakan sejumlah jurnal penelitian yang merupakan beberapa sumber sekunder dan berbagai

sumber lainnya sebagai sumber primer. Keterangan dan sumber-sumber yang dipakai digunakan dalam setiap penulisan ini merupakan sumber yang relevan dan mengandung fakta sejarah. Adapun yang merupakan sumber tersebut diantaranya : Notosusanto, Nugroho dan Basri, Yusmar. 1980. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga terdapat sumber-sumber lain berupa jurnal.

Dalam setiap data dan fakta sejarah dari sumber-sumber yang digunakan oleh penulis diperoleh dari beberapa tempat perpustakaan dan milik pribadi, yaitu dari perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Ruang Baca FKIP Universitas Sriwijaya dan Lab Sejarah Universitas Sriwijaya dan lain-lainnya .

Data-data yang sudah didapat, penulis secara sistematis langsung kemudian dianalisis melalui Metode Sejarah yang sudah ada dan kemudian dihistoriografikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Munculnya pergerakan dan berdirinya organisasi pemersatu Guru di Indonesia

Munculnya pergerakan para guru-guru di Indonesia dan beberapa wilayah Hindia Belanda pada saat itu, secara jelas dapat kita ketahui pada saat penjajahan Portugis, dimana pada saat itu didirikannya sekolah-sekolah pertama oleh pemerintah kolonial Portugis di pulau Ambon, Maluku. Tepatnya pada tahun

1536 (Supriadi, 2003:7). Pada masa pemerintahan Kolonial dan penjajahan portugis, organisasi pergerakan guru sudah terbentuk. akan tetapi pada umumnya mereka merupakan para guru Agama Katholik aliran Ordo Jesuit dan aliran Dominikan. Maka dari itu, Organisasi itu dinamai gerakan guru Ordo Jesuit dan Dominikan. Pergerakan para guru-guru pada saat itu telah mampu memrealisasikan apa yang ingin orang-orang Portugis capai, yaitu penyebarluasan Agama Khatolik yang didalamnya ada ajaran Ordo Jesuit dan Dominikan.

Ketika penjajahan kolonial Inggris di Indonesia, organisasi guru-guru mengalami kemunduran dan tidak terorganisir, hal ini disebabkan oleh pemerintahan Raffles pada saat itu lebih ingin menuju kepada penelitian tentang pulau Jawa yang dilakukan oleh Raffles sendiri. maka dari situlah yang menyebabkan organisasi-oraganisasi guru menjadi melemah. Sedangkan pada masa penjajahan Belanda, Gerakan oraganisasi guru muncul karena rasa ingin mendapatkan kesejahteraan bagi para guru yang dimulai dengan terbentuknya Organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat (PGHB) yang selanjutnya dengan transformasi masa pemerintahan yang berada di Indonesia organisasi PGHB terus berkembang dan akan berganti menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Organisasi PGRI merupakan organisasi yang akan menajdi PGRI dikemudian hari. Awal perjuangan organisasi

guru pada masa penjajahan Belanda merupakan sebuah pergerakan yang dilandaskan terhadap keinginan kebebasan dari belenggu Belanda yang dimaulai pada tahun 1894, yang merupakan awal ditandainya organisasi Kaum Pekerja Upah Pertama sebagai guru sekolah dasar dan menengah Belanda. Kumpulan-kumpulan para pekerja-pekerja buruh ini berdiri dengan nama *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG). (Tedjasukmana, 2008:8).

Organisasi NIOG masih memiliki keterikatan dengan pemerintahan Belanda dan tidak memiliki pengaruh penting dalam pergerakan buruh di Indonesia. Anggota yang tergabung dalam organisasi NIOG adalah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta Belanda. Mereka membuat organisasi ini merupakan upaya untuk mempersatukan para guru-guru yang sudah ada menjadi suatu serikat para guru yang kecil di sejumlah sekolah swasta Belanda.

Organisasi NIOG pada tahun 1956 sudah terdaftar dengan enam cabang dan anggota 320 individu. Organisasi ini menjadi dasar pertama bagi pergerakan para guru di Indonesia. Sebagai upaya untuk mempersatukan dan menyamakan perjuangan, akhirnya pada tahun 1912 terbentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang pada masa tahun pertama dipimpin oleh Karto Soebroto. Organisasi ini merupakan gabungan antara

beberapa guru-guru yang ada di Hindia Belanda pada masa itu, yang anggotanya terdiri dari : (Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah), pada perkembangan pertama organisasi ini memiliki cara pergerakan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Selain itu, organisasi ini bersifat unitaristik. Setiap anggota memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, hal ini merupakan sebab dari mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat, hal tersebut bukan halangan bagi organisasi ini dalam terus memperjuangkan kesejahteraan bangsa dan negara. PGHB memiliki tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan nasib para anggota yang terdiri dari beberapa tuntutan yang diinginkan oleh organisasi ini yaitu mengenai pangkat guru yang masih tidak jelas, status sosial yang terus diperjuangkan dalam setiap pergerakan para guru-guru di Hindia Belanda pada saat itu, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, hal tersebutlah yang menjadikan tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru. (Supriadi, 2003:65).

Banyaknya permasalahan dalam negeri terutama dalam sosial dan politik, membuat sulitnya terciptanya kesatuan dalam perjuangan guru, sehingga muncul perpecahan dalam proses pergerakan yang dari awal memiliki banyak tantangan dan hambatan. Sehingga muncul sebuah organisasi PGHB yang merupakan wujud perkembangan dalam

pergerakan para guru di Indonesia yang akan berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau bisa disingkat PGI pada tahun 1932. dalam proses perubahan ini memerlukan waktu yang panjang dan dalam perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, hal ini disebabkan oleh karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia (Yunus, 2003:34).

Akan tetapi perkembangan struktur organisasi secara formal yang terdapat dalam PGI, pada masa penjajahan Jepang mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan pemerintah Jepang pada saat itu memrintahkan untuk melarang dan menutup semua kegiatan organisasi PGI. Sehingga segala kegiatan pendidikan politik berhenti. Masalah tersebut tidak bertahan lama, ketika Jepang takluk terhadap sekutu, semua kegiatan dalam pembelajaran di sekolah kembali dibuka. akan tetapi pembukaan kembali kegiatan di sekolah-sekolah tersebut, hal itu merupakan cara yang memiliki kepentingan-kepentingan didalam upaya pemerintahan kolonial Jepang pada saat itu sangat bermuatan politis, diaman dalam setiap pengajaran yang diperoleh oleh peserta didik adalah untuk upaya pemerintahan pada saat itu membawa misi Nipponisasi dan pemberdayaan bangsa Indonesia mendapatkan tenaga untuk perburuhan dan mobilisasi militer yang akan digunakan oleh militer kekuatan

jepang saat perang yang akan datang (Yunus,2003:78)

Munculnya PGRI merupakan adanya bentuk rasa dalam memperjuangkan kesejahteraan guru yang masih memiliki permasalahan-permasalahan, hal tersebut membuat perkumpulan-perkumpulan para guru yang bersekala kecil bergabung menajdi besar dan menjadi sebuah Organisasi yang utuh dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Akhirnya dengan meleburka semua perbedaan yang terdapat dalam diri mereka akhirnya terbentuklah organisasi PGRI. Selain itu PGRI merupakan organisasi profesi yang berlandaskan pada pengetahuan, keterampilan, pengakuan yang terdapat dalam setiap potensi yang ada didalam diri seseorang. Organisasi PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Yang merupakan awal kongres PGRI ke-1 dan menjadikan pengaruh PGRI dalam pergerakannya. (Supriadi,2003:65).

Kehadiran organisasi para guru yang bernama PGRI merupakan sebagai upaya bentuk cara untuk memperjuangkan kesejahteraan guru yang pada masa itu bangsa Indonesia sedang mengalami proses berevolusi menuju cita-cita kemerdekaan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. (Hadiatmadja, 2000:19).

Tumbuhnya rasa perjuangan dan semangat berkobar yang direalisasikan dalam bentuk perjuangan organisasi Guru-guru Indonesia

dalam menuntut hak-hak yang selayaknya diperoleh oleh para guru merupakan langkah diawal perjuangan yang dilakukan oleh para guru dengan tidak henti-hentinya memperjuangkan cita-cita bangsa. Bentuk perjuangan tersebut dilakukan dengan kongres pertama untuk mendirikan PGRI. Pada tahun-tahun berikutnya telah berhasil dilaksanakan beberapa kongres yang sangat artinya perumusan perjuangan PGRI. (PGRI, 2010:12). Akan tetapi dalam setiap kegiatan organisasi PGRI selalu dipenuhi tantangan dan hambatan, seperti pada masa Orde Lama dimana munculnya Partai Komunis Indonesia membuat PGRI mendapatkan gangguan. PKI menganggap PGRI merupakan musuh mereka, karena PGRI masih mempertahankan Ideologi Pancasila. PKI berupaya menghentikan laju gerak PGRI, dengan membuat para anggota-anggota PGRI yang berafiliasi dengan PKI membuat gerakan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PGRI. Gangguan-gangguan dari PKI ini sudah muncul dari beberapa kongres-kongres yang diselenggarakan PGRI, antara lain kongres ke-7 sampai kongres ke-11.

b) Munculnya perseteruan PGRI dan PKI

Organisasi PGRI atau (Persatuan Guru Republik Indonesia) merupakan bentuk upaya mempersatukan para guru yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan anggotanya terdiri dari berbagai kalangan merupakan guru-guru sekolah dasar yang memiliki rasa ingin

merubah kesejahteraanya dengan mengikuti pergerakan yang dikakukan oleh organisasi PGRI, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas dan sebagainya, hal tersebut merupakan tantangan dalam mempersatukan rasa dan mempersatukan tekad dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Anggota PGRI di setiap daerah memiliki status sosial politik yang cukup tinggi, hal tersebut membuat PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam seperti orgainsasi-organisasi lainnya. Ketika usaha penguasaan PGRI dari dalam tidak berhasil, PKI pada tahun 1963 mengadakan PGRI tandingan yang diberi nama PGRI Non-Vaksentral di bawah pimpinan Subandri dan Muljono, yang mendapat sokongan dari menteri P&K dan Sekjen P&K. Dalam gangguannya PKI melancarkan beberapa gangguan agar kegiatan PGRI terhambat yaitu dengan mengintuksikan agar setiap kongres-kongres PGRI setiap anggotanya yang berafilisiasi untuk mempengaruhi anggota lainnya untuk tidak hadir dalam kongres tersebut dan memharapkan mereka bergabung dengan mereka dengan membuat organisasi PGRI-Non Vaksentral.

Pada saat munculnya gangguan yang diakibatkan oleh PKI, terdapat bebrapa masalah-masalah yang terjadi didalam tubuh PGRI yaitu pada saat bulan-bulan pertama sesudah kongres IX dilakukan, organisasi tersebut memiliki keuslitan dalam pembiayaan

dan pendanaa dalam setiap kegiatan pergerakan organisasi. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia dengan PB PGRI di kedua provinsi tersebut diserobot oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. (Rahmad.Hidayat.2013:24)

Ketika organisasi PGRI Non Vaksentral sampai dibubarkannya, setelah terjadinya sebuah peristiwa yang memilukan bagi bangsa Indonesia yaitu pemberontakan G30S/PKI membuat beberapa perubahan yang begitu besar dalam pergerakan dari organisasi PGRI, yaitu PGRI Non-Vaksentral yang merupakan organisasi sejenis dengan PGRI yang merupakan upaya yang dilakukan oleh PKI dalam membuat PGRI yang asli terambil alih seperti organisasi lainnya. Akan tetapi usaha yang dilakukannya tersebut ternyata kurang berhasil mendapat dukungan dibandingkan PGRI yang asli, terutama diluar pulau Jawa.

(Poesponegoro. Notosusanto.1993:370)

d) Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

Pada saat penerapan pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959, Situasi demokrasi yang terjadi didalam negeri Indonesia mengalami banyak pemnbaruan dan perubahan yang merupakan

sebagai tolak ukur dari ajang demokrasi Indonesia pada saat itu, hal tersebut dimunculkan dengan banyaknya partai-partai yang berdiri dalam pemilu saat itu. Pada saat menjelang Pemilu tahun 1955, dalam pemilu tersebut terdapat banyak partai-partai besar seperti ; Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI), kedua partai tersebut sangat memiliki dominasi dalam pertarungan yang panas dalam kontestasi pertarungan politik. segala hal dipakai dalam memperjuangkan partainya untuk menang dalam pemilu pada saat itu, tidak jarang ada unsur propaganda yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam usaha memperjuangkan kemenangan partai masing-masing. Setelah Pemilu tahun 1955, keadaan bangsa Indonesia tidak kunjung mereda namun jauh semakin panas. banyak masalah-masalh yang timbul pasca pemilu yang dilaksanakan tersebut. Dalam hal lain muncul sebuah anggapan dalam perpolitikan bangsa Indonesia dinamakan banyak yang menduga dan berargumentasi tentang keadaan politik bangsa pada saat itu. Sehingga muncul stigma bahwa PKI disebut-sebut sebagai "Partai Anak Emas" oleh Presiden Soekarno. Setelah pemilu selesai masyarakat dibingungkan dengan rasa persatuan yang ada didalam masyarakat Indonesia, banyak masyarakat yang masih terbawa suasana panas nya konstentasi pemilu yang terjadi di Indonesia, sehingga masa itu sangat sulit bagi setiap warga negara untuk menjadi independen dan tidak berada dalam

belenggu politik sangat tidak memungkinkan, hal ini disebabkan rasa fanatisme yang muncul dari doktrin partai-partai politik yang membuat masyarakat terikat pada arus politik Indonesia yang sedang menggebu-gebu tersebut. Keadaan tersebut juga berpengaruh termasuk pada kalangan guru, banyak para guru yang terbawa arus pemikiran partai dan tidak memiliki semangat lagi dalam persatuan di Organisasi PGRI.

Tingginya tensi politik dalam negeri yang terus memanas membuat guru kehilangan rasa persatuan, hal tersebut terbukti dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Marhaenis, Persatuan Guru NU, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan seterusnya. Akhirnya organisasi PGRI mengalami perpecahan karena perbedaan cara pandang terhadap afiliasi politik. Sebelumnya PGRI sejak tahun 1959 sudah terdapat banyak masalah, antara lain yaitu adanya guru-guru yang condong pada suatu partai politik tertentu, dan yang paling kuat dalam melakukan pandangan politiknya di forum-forum PGRI ialah yang bersimpati pada PKI.

Kondisi tubuh organisasi PGRI pada saat Kongres ke X di kota Jakarta pada bulan November tahun 1962, mengalami perpecahan dan panasnya perseteruan dan semakin meruncinnya kemunduran persatuan organisasi, hal tersebut merupakan pengaruh yang terjadi akibat dari persinggungan

kepentingan anggota dan adanya gangguan yang dilakukan oleh PKI. Soebandri yang dianggap orang PKI ditubuh PGRI, Soebandri diduga menuduh ketua umum M.E. Subiyadinata anti Manifesto Politik yang saat itu menjadi kebijakan politik Presiden Soekarno.

Usaha Soebandri dalam hal ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas dimana untuk menurunkan Subiyadinata dari kursi Ketua Umum PGRI dan mungkin dirinya atau setidaknya kekuatan PKI yang bisa berkuasa selanjutnya. Namun usaha yang dilakukannya ternyata tidak membuahkan hasil. Masih kokohnya kekuatan persatuan di beberapa anggota PGRI yang setia dengan landasan dasar perjuangan Organisasi PGRI saat awal dibentuk. Karena usahanya gagal, pada Juni 1964 organisasi itu pecah dengan terbentuknya PGRI Non-Vaksentral yang terdiri dari guru-guru pendukung garis politik Presiden Soekarno dan kadung dicap sebagai "PGRI nya PKI" pada 30 September 1965.

Ketika saat kongres PGRI yang dilaksanakan di Surabaya pada bulan Oktober tahun 1969. Percobaan pengambil alihan kekuasaan dalam PGRI yang dilakukan oleh sekelompok-kelompok orang yang berafiliasi dengan PKI semakin terasa dimana banyak argumentasi yang terjadi dan bukan menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi menambah permasalahan baru dalam

tubuh organisasi PGRI. Namun akhirnya upaya penyusunan yang dilakukan oleh PKI dan upaya untuk mengambil alih kekuasaan atas PGRI tidak berhasil, mereka secara terang-terangan mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari PGRI, hal tersebut sebagai upaya terus untuk menguasai PGRI.

Setelah segala upaya yang dilakukan untuk menguasai PGRI tidak berhasil, PKI membuat organisasi tandingan sebagai upaya kedua dalam menguasai PGRI. Cara tersebut dilakukan karena segala taktik-taktik dalam upaya penyusunan yang dilakukan sebelumnya tidak sesuai dengan rencana PKI dalam menguasai PGRI. Terbentuknya organisasi tandingan yang dibuat PKI merupakan langkah kedua mereka ketika langkah awal mereka tidak menuai hasil yang memuaskan. Organisasi ini diberi nama PGRI non Vaksentral, dalam organisasi ini terdapat sekelompok guru-guru yang berafiliasi dengan PKI dalam rencana untuk pengambilalihan kekuasaan PGRI yang asli.

Kondisi perpecahan dalam PGRI dalam eksistensi perjuangan pergerakan organisasi sangat dipengaruhi oleh munculnya PGRI Non Vaksentral ini. Kondisi kekacauan terdapat pada cabang-cabang PGRI yang berada di daerah-daerah, mereka merasa kebingungan dengan dualisme yang ada dalam tubuh organisasi PGRI. (Yunus., 2003:89) Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan pendidikan di Indonesia dari perpecahan yang

terjadi di kalangan guru, sehingga Presiden Soekarno turun tangan dengan membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Penpres (Penetapan Presiden) No. 19 tahun 1965 tentang Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari Panitia Negara untuk Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Akan tetapi pembentukan Kepres tersebut tidak berimbas banyak dalam proses pemersatuan kembali anggota-anggota PGRI, banyak faktor yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi.

e) Kondisi PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro dengan PKI. Pada saat itu banyak anggota PGRI yang bukan berpaham PKI bersama para mahasiswa, rakyat dan elemen lainnya melakukan gerakan untuk menuntut Tritura (Tri Tuntunan Rakyat). Selanjutnya mereka melakukan sebuah aksi dan membentuk kumpulan aksi yang bergabung dengan beberapa masyarakat yang menuntut penghapusan PKI dalam setiap unsur di Indonesia. Aksi-Aksi tersebut melahirkan beberapa kesatuan-kesatuan aksi, seperti : KAMI, KASI, sedangkan para guru-guru membentuk KAGI atau yang dikenal dengan Kesatuan Aksi Guru Indonesia pada tanggal 2 februari 1966. Pada mulanya KAGI ini terbentuk di Jawa Barat dan Jakarta yang banyak anggotanya merupakan para guru yang

kontra dengan PKI yang terus ingin berkuasa dalam ruang lingkup PGRI, mereka berupaya menyingkirkan PKI dalam setiap kegiatan yang dilakukan PGRI yang asli. Tidak lain tidak bukan tuntutan tersebut merupakan proses yang panjang dalam memperjuangkan kembali keberadaban pendidikan Indonesia yang berlandaskan pada ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada beberapa tugas yang menjadi pokok-pokok terbentuknya KAGI ini, yaitu :

1. Menghilangkan dan membersihkan semua kegiatan dalam pendidikan di Indonesia dari unsur PKI dan orde lama, sehingga terwujudnya kembali landasan dasar yang menjadi cita-cita bangsa dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
2. Menyatukan kembali semua guru yang pada mulanya terpecah menjadi dualisme menjadi satu dalam satu Organisasi PGRI, yang sesuai dengan pergerakan awal guru sebelum kemerdekaan ada di Indonesia.
3. Menjadikan PGRI sebagai organisasi yang bukan berafiliasi dengan partai politik, sehingga PGRI memiliki independenitas dalam melakukan pergerakan demi memajukan pendidikan bangsa Indonesia.

Keberhasilan dalam kekuatan PGRI dalam masa Orde Baru membuat PGRI diperhitungkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari Kongres XI, yaitu :

1. Dalam Kongres ini memutuskan agar organisasi PGRI lebih memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM yang ada di Indonesia.
2. Organisasi PGRI diharapkan memiliki wakil secara resmi dalam DPR GR atau MPRS, sebagai upaya untuk membantu dalam pembuatan keputusan dalam pendidikan Indonesia yang sesuai dengan landasan PGRI.
3. Frontnasional didalam PGRI di bubarkan.
4. Mempertegas bahwa PGRI adalah organisasi yang bersifat Unitaristik, Independen dan Non Partai Politik.
5. Melakukan penyebarluasan berita tentang segala kegiatan organisasi melalui pers, Radio, TV dan Majalah.
6. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pleatihan bagi para kader organisasi PGRI secara teratur dan terencana.
7. Upaya untuk PGRI menjadi bagian dari anggota WCOTP.

Pada tahun 1969, dengan adanya permasalahan yang terjadi dikalangan guru-guru yang berada diruang lingkup PGRI, pemerintah memberikan keputusan agar memperbaiki kesejahteraan guru di Indonesia dengan mencairkan beberapa dana untuk tunjangan bagi para guru di Indonesia, terutama bagi guru-guru sekolah dasar. Perkembangan PGRI semakin kuat dengan diadaknya konsolidasi dengan ikut sertanya PGRI dalam menjadi anggota WCOPT secara resmi pada

bulan juni tahun 1966, dalam kongres guru se-dunia di Korea Selatan. Dalam hal ini PGRI membangun relasi untuk membangun dan ikut serta dalam perkembangan pendidikan dunia yang akan berdampak baik bagi pendidikan di Indonesia.

Setelah menjadi anggota WCOPT, PGRI mendapatkan undangan untuk mengikuti tradeunionleader course yang diselenggarakan di negeri belanda, dalam hal ini para guru di Indonesia mendapatkan kursus selama 4 bulan, kursus di adakan 2 angkatan yaitu Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 pada tahun 1970.

Terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang terpusat di Jakarta membuat PGRI Non Vaksentral mengalami keredupan, hal ini beriringan dengan penghilangan unsur PKI dalam setiap segi kehidupan rakyat Indonesia. Penumpasan anggota-anggota PGRI Non Vaksentral terjadi pada tahun 1966-1977 yang dilakukan oleh prajurit TNI dan beberapa dari mereka ditahan tanpa pengadilan, ada yang ditembak mati ditempat dan lain-lain. Tidak banyak anggota mendukung atau tergabung dalam PGRI Non VakSentral yang terlibat dalam peristiwa tersebut, bahkan tidak semuanya adalah pendukung PKI.

Pada tahun antara 1966-1972 merupakan titikawal pembenahan lagi dalam tubuh organisasi PGRI dan merupakan masa perjuangan untuk menegakan Orde Baru, dalam pembangunan lagi organisasi dan penyelarasan

visi misi yang menjadi patokan dasar pergerakan organisasi PGRI kembali disusun.

Pembangunan pendidikan secara nasional yang baru yang harus tertanam dalam diri seorang guru yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukung. Sealin itu upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan para anggota PGRI banyak dilakukan proses kaderisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk membanun pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Kaderisasi tersebut dimulai pada tahun 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli tahun 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur. (Kartodirdjo, Sartono. dkk. 1975:340). Selanjutnya PGRI mdalam membuat kesatuan organisasi PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI mendukung berdirinya PSPN yang dipimpin M.E. Subiadinata.

Terakhir, dalam pergerakan PGRI ditahun 1967, PGRI mendorong dan memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI. Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar :

- 1) FBSI merupakan anggota dari berbagai unsur buruh murni

- 2) Anggota FBSI merupakan buruh-buruh swasta
- 3) FBSI berprinsip “trade unionisme”
- 4) FBSI merupakan organisasi yang berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

SIMPULAN

Kita ketahui bahwa pergerakan PGRI sejak awal berdirinya merupakan sesuatu proses yang amat panjang. PGRI memiliki landasan dasar yang menjadi pokok pengajaran bagi perkembangan pendidikan bangsa Indonesia, sejak berdirinya sampai sekarang PGRI adalah merupakan organisasi yang menghimpun seluruh guru-guru di Indonesia yang memiliki tekad dan niat dalam pemajuan bangsa Indonesia dalam sektor pendidikan. Dalam proses perkembangan pendidikan, PGRI memiliki andil besar dalam pemajuan kualitas dan kemampuan masyarakat di Indonesia. PGRI juga memiliki peranan dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar yang unggul dan berkompeten dalam bidang pengajaran, yang akan membantu dalam proses pemajuan bidang pendidikan di Indonesia.

Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung kedalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda.

Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh.Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta.

Peran Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia, serta meletakkan dasar bagi pendidikan yaitu dijadikannya Pancasila sebagai landasan ideologi Pendidikan.

Perpecahan yang terjadi didalam internal PGRI merupakan tantangan zaman yang harus dihadapi oleh PGRI sebagai organisasi yang berkembang pada sampai saat ini. Organisasi PGRI dituntut untuk selalu berinovasi demi memajukan pendidikan bangsa Indonesia yang berpatokan pada landasan ideologi Pancasila.

REFERENSI

- Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSP-PGRI), Jilid II, III, IV, V. Semarang : IKIP PGRI
- Kosasih.Ahmad.2016.Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah PGRI di Awal Pendidiriannya.Bali: Universitas Indraprasta PGRI
- Kartodirdjo, Sartono. dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid III. Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan.
Kartodirdjo, Sartono.. dkk.
1975. Sejarah Nasional
Indonesia Jilid III. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

PGRI., 2010. Buku Sejarah
Perjuangan Jatidiri PGRI
2010. “Sejarah Lahirnya
PGRI Dan Kongres PGRI
(<http://pgrikarangtengah.blogspot.com/2010/07/tujuan-organisasi-pgri.html/>)
Diakses pada 22 Mei 2014.

Rakhmat Hidayat,2011.Dinamika
Sosial Gerakan Guru di
Indonesia. Jakarta: Universitas
Negeri Jakarta

Tedjasukmana, Iskandar. 2008. Watak
Politik Gerakan Serikat Buruh
Indonesia (terjemahan Oey
Hay Djoen). Ithaca: Seri
Modern Indonesia Project
Southeast Asia Program
Department of Far Eastern
Studies Cornell University.

Yunus., 2003. PGRI dari masa ke
masa. Jakarta: PGRI YPLP.